

ISBN 979-458-703-6



PROSIDING **SEMINAR NASIONAL:**

Membangun Budaya Akademik Melalui Kompetitif Penelitian

Growth Centre, 27-28 Nopember 2013

Tim Editor

Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd., M.H

Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.IKom

Muharnif M, S.T., M.Sc

Rahmayati, S.H., M.AP

Keynote Speaker: Prof. Dian Armanto, M.Pd, M.A, M.Sc, Ph.D

UNIVERSITAS AL AZHAR MEDAN
BEKERJASAMA DENGAN GROWTH CENTRE
KOPERTIS WILAYAH I SUMUT

 USU press

25	MODEL SINERGI PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA BIDANG PEMASARAN PADA USAHA MIKRO DI SUMATERA UTARA Ade Indah Sari, Kiki Farida Ferine, Tetty Juliaty	265
131	PENGARUH PEMBERIAN AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC) TERHADAP KEMAMPUAN FUNGSIONAL KOMUNIKASI DAN DEPRESI PASIEN AFASIA MOTORIK DI TIGA RSUD JAWA BARAT Amila.....	285
139	SINERGITAS MATERI JIHAD MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DI PESANTREN NUR-HASANAH Abrar Adhani, Irvan	299
149	RANCANGAN PELATIHAN PRAKTIS PRANIKAH BAGI PEMBENTUKAN KELUARGA UTUH SEJAHTERA Ahmad Fauzi	307
164	MODEL AWAL PENGEMBANGAN SOFT SKILL MELALUI REKRUITMEN, DAN KADERISASI SERTA REVISI VISI DAN MISI PARTAI POLITIK BERBASIS NASIONALIS DI KOTA MEDAN Alesyanti	315
175	MODEL PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH YANG DILAKUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Elizar Sinambela	324
184	PENATAAN VARIABEL REKRUITMEN DAN KARIR HAKIM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Nurul Hakim.....	332
193	POTRET PENYULUHAN DI LAPAS KLS IIB LUBUK PAKAM M. Syukran Y. Lubis	338
203	PENGEMBANGAN MODEL SOSIALISASI SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA MEDAN ✓ Syafrida Hani	345 ✓
214	PERANAN KOPERASI PRODUKTIF SEBAGAI WADAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NELAYAN INDAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN Raihanah Daulay, Asmawita Abdullah Manaf	355
224	MEDIASI EARNING TERHADAP HUBUNGAN ANTARA RESIKO KREDIT DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM Alistraja Dison Silalahi, Umar Darwis	367
236	MODEL PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU DI SUMATERA UTARA Taufik Siregar	379
251	MODEL PENGATURAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PROSTITUSI BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU Taufik Siregar, Nurhayati A, Anwar Sadat	392

PENGEMBANGAN MODEL SOSIALISASI SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA MEDAN

Syafrida Hani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan Medan (061) 6624567
e-Mail : syafridahani92@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif dengan menghasilkan produk berupa model sosialisasi perda petunjuk pelaksanaan pajak restoran sebagai alat pengawasan bagi peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan. Karena dari hasil temuan dari survey kepada responden ditemukan bahwa sebagian besar para pengusaha atau staf keuangan perusahaan tidak mengetahui secara pasti peraturan daerah No. 5 tentang Pajak Restoran, demikian pula dengan pemahaman tentang tata cara perpajakan. Para pengusaha restoran tidak mencantumkan secara terbuka pemungutan pajak restoran, penyeteroran dan pelaporan pada umumnya merasakan kesulitan dan menyatakan tidak paham cara mengisi formulir yang dibutuhkan untuk kelengkapan perpajakan. Beberapa responden bahkan menggunakan konsultan pajak untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Pada akhirnya pihak Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka telah maksimal melakukan sosialisasi, sedangkan dari aspek Wajib pajak para pengusaha dan staf keuangan menyatakan kurang sosialisasi. Produk akhir yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa booklet dan leaflet petunjuk dan tatacara pelaksanaan pajak restoran yang disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang diatur dalam Peraturan Walikota Medan No.11 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Kata Kunci : model sosialisasi pajak restoran, booklet, leaflet petunjuk pelaksanaan pajak restoran.

Pendahuluan

Pajak restoran merupakan salah satu sumber kontribusi yang cukup besar bagi PAD kota Medan. Pertumbuhan usaha restoran, rumah

makan dan sejenisnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah sehingga PAD juga meningkat. Kondisi tersebut berkaitan dengan masalah kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan berpengaruh langsung terhadap kinerja penerimaan pajak (Suryadi, 2006), dan masih banyaknya wajib pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan yang berlaku mengakibatkan penerimaan pajak belum maksimal. Apapun sistem dan administrasi perpajakan yang digunakan, jika kepatuhan dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi (Harahap, 2004).

Jika mengacu pada kategori wajib pajak restoran yang tertuang dalam Perda Kota Medan No. 12 tahun 2003, dilapangan masih banyak restoran yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak tetapi belum dapat dijangkau oleh pemerintah daerah. Selain itu ada indikasi jumlah pajak restoran yang telah dipungut dari konsumen oleh pihak restoran tidak disetor seluruhnya ke kas pemerintah daerah.

Penelitian Putri (2006) terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Surabaya menemukan

adanya peningkatan pemasukan dari sektor pajak restoran setiap tahunnya, namun pemasukan ini masih jauh dari potensi rill yang ada di lapangan, masih banyaknya jumlah objek pajak yang belum terdaftar, jumlah tunggakan yang tinggi, sampai kepada masalah wajib pajak yang tidak jujur, serta aparat yang kurang professional, semuanya itu sangat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak restoran. Dalam pelaksanaannya, pajak restoran yang dipungut dari konsumen 10% dari total pembayaran atas makanan dan minuman yang dikonsumsi. Namun, apakah pengusaha menyetorkan seluruh pajak yang telah dipungutnya masih perlu pengawasan. Jika tidak, tentu bukan hanya Negara yang dirugikan tetapi juga konsumen yang telah dipungut pajaknya tetapi tidak disetor ke kas Negara. Penelitian Syafiqurrahman dan Sri Suranta (2006) menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi fiskus dalam pemungutan pajak antara lain disebabkan karena wajib pajak tidak membuat pembukuan atau membuat pembukuan ganda, tidak semua transaksi yang dilakukan Wajib

Pajak menggunakan nota (bill) serta omzet penjualan yang dilaporkan kurang transparan.

Permasalahan dalam perpajakan umumnya disebabkan pada kondisi ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan (Lubis dan Syafridahani, 2009). Sebagian besar wajib pajak mengaku bahwa semua disebabkan karena kurangnya sosialisasi, padahal dari aspek fiskus sendiri beranggapan sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan baik dan efektif. Jika ditelusuri dengan lebih mendalam sebenarnya permasalahan yang terjadi hanya disebabkan ketidakpedulian wajib pajak dan kurang intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus. Hasil temuan dari survey pada penelitian sebelumnya peneliti menemukan bahwa sebagian besar para pengusaha atau staf keuangan

perusahaan tidak mengetahui secara pasti peraturan daerah No. 5 tentang Pajak Restoran, demikian pula dengan pemahaman tentang tata cara perpajakan. Para pengusaha restoran tidak mencantumkan secara terbuka pemungutan pajak restoran dengan alasan bahwa kurang memahami isi dari ketentuan peraturan tersebut dan tata cara perpajakannya.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti penyetoran dan pelaporan pada umumnya merasakan kesulitan dan menyatakan tidak paham cara mengisi formulir yang dibutuhkan untuk kelengkapan perpajakan. Beberapa responden bahkan menggunakan konsultan pajak untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Padahal pihak Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka telah maksimal melakukan sosialisasi, sedangkan dari aspek Wajib pajak para pengusaha dan staf keuangan menyatakan kurang sosialisasi. Sehingga penulis tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, untuk

memfasilitasi kebutuhan antara pihak pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Dispenda Kota Medan sebagai fiscus, dengan Pengusaha Restoran sebagai wajib pajak dalam hal kemudahan memahami tata cara perpajakan.

2. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan solusi alternatif bagi pemerintah daerah kota Medan dalam pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaksanaan pajak restoran
2. Memberikan petunjuk alternatif bagi pengusaha dan pengelola restoran agar lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban pajak restoran

3. Pendekatan Pemecahan Masalah

Model pengawasan yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan upaya pengawasan dan optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.yang

dikemukakan Siddik (2002) dan akan dimodifikasi sesuai karakteristik Kota Medan. Upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui antara lain 1).Memperluas basis penerimaan, 2).Memperkuat proses pemungutan, 3).Meningkatkan pengawasan, 4).Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,5).Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Menurut Riduansyah (2003) untuk mengatasi masalah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini adalah dengan cara melakukan intensifikasi antara lain data yang sudah ada dimutakhirkan, meningkatkan frekuensi jam kerja pemungutan, setiap bulan secara periodik mengadakan evaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dilapangan, mengubah Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terkait dengan pengawasan sistem pemungutan pajak restoran. Dari hasil survey yang

dilakukan diperoleh informasi bahwa masalah sosialisasi merupakan salah satu hal yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada pajak restoran.

Hal ini mendorong peneliti untuk menyiapkan sarana sosialisasi yang dibutuhkan untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak yakni pengusaha atau pengelola restoran sebagai wajib pajak dan Pemerintah Daerah Kota Medan sebagai fiskus. Untuk itu peneliti telah menyiapkan *booklet* dan *leaflet* sebagai salah satu alternatif dalam mensosialisasikan peraturan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat dengan mudah memahami semua ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pajak restoran yang berlaku di Kota Medan.

4.. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development*. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha restoran yang berada di kota Medan khususnya UPT 3 yakni wilayah

kecamatan Medan Helvetia dan Medan Sunggal, UPT 4 wilayah Kecamatan Medan Barat, UPT 5 wilayah kecamatan Medan Baru, UPT 6 meliputi wilayah Medan Selayang dan Medan Tuntungan

Teknik pengumpulan data secara umum menggunakan :

1. Studi lapangan dengan penyebaran instrumen penelitian kepada sampel dalam hal ini pengusaha restoran.
2. Studi Pustaka mengenai peraturan perpajakan secara umum dan pajak restoran khususnya

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil riset di lapangan yang dilakukan menemukan bahwa bukan hanya pada jumlah setoran pajak yang tidak sesuai dengan pungutan pajaknya, tetapi juga masih banyaknya pengusaha restoran, rumah makan dan sejenisnya yang belum menyadari bahwa dirinya adalah wajib pajak, atau dengan sengaja menghindari dari kategori wajib pajak. Temuan lainnya dari pengamatan dan data yang dikumpulkan masih banyak

jumlah restoran dan rumah makan yang belum teridentifikasi sebagai wajib pajak, padahal jika ditelusuri dari omzet penjualan perbulan kemudian dirujuk pada ketentuan UU tentang Pajak Daerah pengusaha restoran tersebut adalah sebagai wajib pajak.

Dari berbagai persoalan yang ditemukan maka penulis telah menyiapkan booklet dan leaflet untuk membantu pemerintah kota Medan dalam mensosialisasikan peraturan pelaksanaan pajak restoran. Penyusunan booklet dan leaflet petunjuk mengenai pajak restoran ini sudah melalui kajian yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam pembahasan isi dan tampilan booklet dan leaflet peneliti telah melaksanakan Forum Grup Diskusi guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak restoran. Dalam kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh pihak Dispenda Medan, perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kota Medan, Perwakilan dari Badan penelitian dan Pengembangan Kota Medan, Beberapa pengusaha Restoran dan

Manajemen Restoran, Konsultan pajak dan Praktisi Pajak serta kalangan Akademis. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh berbagai masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan isi buku petunjuk tersebut

Booklet telah disusun dalam bentuk yang menarik dan berbeda dengan peraturan yang selama ini disusun dan disosialisasikan oleh pihak pemerintah daerah. Booklet ini berisikan tentang Sistematika penyajian dalam buku petunjuk tersebut dimulai dengan menyajikan booklet yang menguraikan prosedur perpajakan dengan gambar dan bagan alur yang disertai dengan penjelasan ringkas. Hal ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sederhana dan mudah dipahami tanpa harus membaca berbagai aturan yang selama ini dianggap merepotkan. Booklet ini juga dibuat berwarna agar lebih menarik perhatian bagi yang membacanya.

Pada bagian kedua isi buku petunjuk ini akan menyajikan informasi berkaitan dengan uraian *self*

assessment system dalam tata cara pajak restoran. Diawali dengan pendahuluan yang menguraikan nama, subjek dan objek pajak restoran. Penyajian yang ringkas dan sederhana diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memahami objek dan subjek pajak restoran. Selanjutnya pada bagian kedua diuraikan tata cara pendaftaran NPWPD beserta pengisian formulirnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi wajib pajak daerah bahwa sebenarnya NPWPD itu penting sebagai identitas dan selain itu dalam proses untuk mendapatkan NPWPD itu sangatlah mudah.

Bagian ketiga mengurai tentang Tata cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran, yang dilengkapi dengan bagan alur prosedur pemungutan, bagan alur prosedur pelaporan, dan selanjutnya tata cara pengisian SSPD (Surat Setoran pajak Daerah) dan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang dilengkapi dengan contoh kasus pengisiannya. Tujuan yang dicapai pada bagian ketiga ini adalah untuk

memberikan informasi bagi wajib pajak bahwa sebenarnya pajak restoran itu bukan beban perusahaan dalam hal ini beban restoran atau pun beban pengusaha restoran ataupun pengusaha rumah makan, tetapi menegaskan kembali bahwa pihak restoran hanyalah pemungut, atau dengan kata lain sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengumpulkan pajak dari konsumen dan membantu konsumen memenuhi kewajiban perpajakannya, karena telah menggunakan jasa layanan di restoran mereka kepada Negara yang dalam hal ini pihak pemerintah kota Medan.

Pada bagian ini juga diuraikan bagaimana jika wajib pajak mengalami lebih bayar dan kurang bayar melalui penetapan dan pembayaran pajak, pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran. Isi pada bagian kedua ini diakhiri dengan penjelasan tentang Pembukuan, Pemeriksaan dan sanksi-sanksi sehubungan dengan pajak restoran. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya pembukuan untuk mendukung pelaporan pajak serta

pentingnya Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan juga dapat dikenakan sanksi yang berlaku baik berupa denda maupun sanksi pidana.

Produk lain berupa Leaflet yang disusun dengan tampilan yang sangat praktis. Leaflet ini sebenarnya juga merupakan bagian dari booklet yang disederhanakan dengan hanya merangkum pada pokok-pokok atau bagian terpenting dalam pelaksanaan kewajiban pajak restoran. Tampilan yang menarik dari leaflet ini akan membuat orang yang melihat akan tertarik untuk membaca isi, dan harapannya akan memberikan kemudahan untuk memahami bagaimana pelaksanaan mengenai pajak restoran.

Dengan adanya booklet dan leaflet mengenai petunjuk dan pelaksanaan pajak restoran yang dikemas sedemikian rupa, dengan tujuan memberikan salah satu alternatif sosialisasi dengan bacaan yang sederhana dan menarik diharapkan para wajib pajak restoran dapat

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan khususnya pajak restoran. Sehingga diharapkan akan meningkatkan pula penerimaan pajak restoran bagi pendapatan asli daerah kota Medan di tahun-tahun mendatang. Tentu saja pendapatan tersebut akan dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya Medan sebagai kota yang maju

5. Kesimpulan

1. Penelitian ini menghasilkan dan menyiapkan model sosialisasi berupa Booklet dan leaflet Petunjuk dan tata cara pelaksanaan Pajak restoran untuk memfasilitasi kebutuhan antara pihak pemerintah Kota dengan pengusaha restoran sebagai wajib pajak
2. Booklet Petunjuk dan tata cara pelaksanaan Pajak restoran yang disajikan berisi enam bagian yang masing-masing membahas tentang nama objek dan subjek pajak restoran, NPWPD, tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan, pembukuan dan

pemeriksaan serta sanksi yang berkaitan dengan pajak restoran

3. Leaflet Petunjuk dan tata cara pelaksanaan Pajak restoran yang disusun adalah merupakan bagian dari booklet yang disederhanakan dengan hanya merangkum pada pokok-pokok atau bagian terpenting dalam pelaksanaan kewajiban pajak restoran.

Saran.

1. Kepada Pemerintah daerah Kota Medan hendaknya memberikan dukungan secara penuh kepada penulis dalam penyebaran Booklet dan Leaflet kepada para pengusaha restoran
2. Kepada pengusaha restoran dapat memanfaatkan booklet dan leaflet untuk kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak restoran

Daftar Pustaka

- Harahap, Abdul Asri (2004) “Paradigma] Baru Perpajakan Indonesia, Perpektif Ekonomi-Politik”. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Lubis, Muhammad Rizal dan Syafrida Hani (2008), Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi pada KPP Medan Timur, Penelitian Dosen Muda.
- Putri, Martianingsih J. Ghozali, (2006) Sistem Pengendalian Manajemen, Administrasi Pemungutan Pajak Daerah Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah : Studi Eksplanatif tentang Pengaruh Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dan Kualitas Administrasi Pemungutan Pajak Restoran terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Restoran Kota Surabaya. Tesis, by Airlangga University Library. Surabaya. <http://adln.lib.unair.ac.id/>
- Riduansyah, Mohammad, (2003) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2.
- .Sidik, Machfud,. DR.,MSc,. (2002) Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Disampaikan

dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” 10 April 2002, Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung.

Suradji, Johanna, (2005) Implementasi Manajemen Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Yang Terutang Bagi Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. PAR Sidoarjo), Skripsi Universitas Kristen Petra, <http://www.digilib.petra.ac.id/viewer>

Suryadi (2006), Model hubungan Kausal kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak; Suatu survey di Wilayah Jawa Timur, Jurnal Keuangan Publik, Volume 4 No.1

Syafiqurrahman, Muhammad., Sri Suranta, (2006) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Surakarta, Penelitian Dosen Muda, <http://lppm.uns.ac.id/sirine/penelitian>.


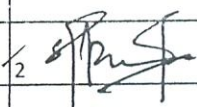
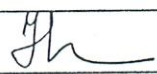





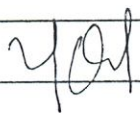
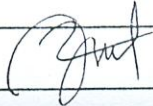

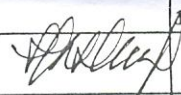
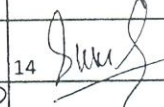

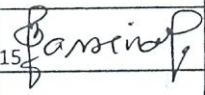


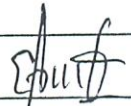
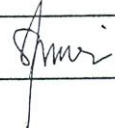
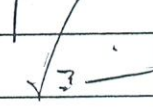

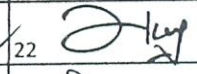




SEMINAR NASIONAL

Membangun Budaya Akademik melalui Kompetitif Penelitian

Daftar Hadir

Hari : Rabu

Tgl : 27-11-2013

NO	Nama	Institusi	Tanda Tangan
1	Rahmi Karolina	USU	1 
2	Sriadhi	Unimed/ Univ. Al Azhar	2 
3	Herlina Manulang	Univ. HKBP Nomensen	3 
4	Rosnawyta Simanjuntak	Univ. HKBP Nomensen	4 
5	Lenny Verawaty Siregar	Univ. HKBP Nomensen	5 
6	Herlina Saragih	Univ. HKBP Nomensen	6 
7	Ani Murwani	STIE Harapan	7 
8	Audia Junita	STIE Harapan	8 
9	Alda Kartika	STIE Harapan	9 
10	Angelia Pribadi	STIE Harapan	10 
11	Zuwina Miraza	STIE Harapan	11 
12	Ade Indah Sari	STIE Harapan	12 
13	Saskia	STIE Harapan	13 
14	Amila	Univ. Sari Mutiara	14 
15	Evarina Sembiring	Univ. Sari Mutiara	15 
16	Iting	Univ. Sari Mutiara	16 
17	Risna Mirabella Saragih	Univa	17 
18	Elizar Sinambela	UMSU	18 
19	Syafrida Hani ✓	UMSU	19 
20	Raihanah Daulay	UMSU	20 
21	Ahmad Fauzi	UMSU	21 
22	Alesyanti	UMSU	22 
23	Nurul Hakim	UMSU	23 
24	Abrar Adhani IRVAN	UMSU	24 
25	M. Syukran Y. Lubis	UMSU	25 
26	Alpi Sahari	UMSU	26 

SEMINAR NASIONAL
Membangun Budaya Akademik melalui Kompetitif Penelitian

Daftar Hadir

Hari : Kamis

Tgl : 28-11-2013

NO	Nama	Institusi	Tanda Tangan	
1	Rahmi Karolina	USU	1	
2	Sriadhi	Unimed/ Univ. Al Azhar	2	
3	Herlina Manulang	Univ. HKBP Nomensen	3	
4	Rosnawyta Simanjuntak	Univ. HKBP Nomensen	4	
5	Lenny Verawatty	Univ. HKBP Nomensen	5	
6	Herlina Saragih	Univ. HKBP Nomensen	6	
7	Ani Murwani	STIE Harapan	7	
8	Audia Junita	STIE Harapan	8	
9	Alda Kartika	STIE Harapan	9	
10	Angelia Pribadi	STIE Harapan	10	
11	Zuwina Miraza	STIE Harapan	11	
12	Ade Indah Sari	STIE Harapan	12	
13	Saskia	STIE Harapan	13	
14	Amila	Univ. Sari Mutiara	14	
15	Evarina Sembiring	Univ. Sari Mutiara	15	
16	Iting	Univ. Sari Mutiara	16	
17	Risna Mirabella Saragih	Univa	17	
18	Elizar Sinambela	UMSU	18	
19	Syafrida Hani	UMSU	19	
20	Raihanah Daulay	UMSU	20	
21	Ahmad Fauzi	UMSU	21	
22	Alesyanti	UMSU	22	
23	Nurul Hakim	UMSU	23	
24	Abrar Adhapi IRVAVU	UMSU	24	
25	M. Syukran Y. Lubis	UMSU	25	
26	Alpi Sahari	UMSU	26	
27	Muharnif	UMSU	27	
28	Rahmat Kartolo S	UMSU	28	
29	Alistraja Dison Silalahi	UMN	29	

